

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengolahan data harga kebutuhan pokok dan barang penting pada periode Oktober - Desember 2025 melalui Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SiLinda Jabar), secara umum perkembangan harga pangan di Kota Banjar pada Triwulan IV 2025 masih menunjukkan fluktuasi, meskipun pada akhir periode mulai terlihat upaya stabilisasi pada beberapa komoditas strategis. Adapun berdasarkan hasil pantauan di Pasar Banjar ditemukan data harga komoditas sebagai berikut:

[illegible]

22 Jeruk 1 Kg*	Rp 20.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 21.000	0,05
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Secara umum, harga sebagian besar komoditas pada akhir Triwulan IV 2025 berada pada tingkat yang relatif terkendali. Komoditas yang cenderung stabil meliputi gula pasir lokal, mie instan, susu bubuk, ikan kembung, tempe, udang, tahu, pisang, dan beberapa komoditas lainnya. Stabilitas ini menunjukkan bahwa pada banyak komoditas, pasokan dan distribusi dapat terjaga secara memadai selama triwulan berjalan.

Di sisi lain, komoditas hortikultura memperlihatkan perubahan yang lebih tajam. Cabe merah mengalami penurunan yang besar dari awal hingga akhir triwulan, sementara cabe rawit merah mencatat kenaikan dan fluktuasi yang kuat kemudian bawang merah dan bawang putih juga mengalami peningkatan harga dibanding awal triwulan.

a. Komoditas dengan Perubahan Harga Signifikan

◦ Cabe Rawit Merah

Cabe rawit merah mengalami fluktuasi yang sangat besar dan berakhir dengan kenaikan bersih. Pada Oktober, harga turun dari Rp 46.000/kg (M2) menjadi Rp 32.000/kg (M4). Pada November, harga kembali melonjak dari Rp 32.000/kg (M2) menjadi Rp 56.000/kg (M4). Di Desember, harga mencapai Rp 70.000/kg pada M2 dan turun ke Rp 58.000/kg pada M4. Secara keseluruhan, harga meningkat 26.09% dari Oktober-M2 ke Desember-M4.

◦ Bawang Merah dan Bawang Putih

Bawang merah naik dari Rp 35.000/kg menjadi Rp 42.000/kg (naik 20.00%). Bawang putih naik dari Rp 35.000/kg menjadi Rp 40.000/kg (naik 14.29%). Bawang merah dan bawang putih merupakan komoditas yang sangat sering dibeli rumah tangga dan berperan penting dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap “mahal/murahnya” kebutuhan pokok. Karena itu, kenaikan pada kelompok bumbu dapur perlu direspons melalui kombinasi penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga di titik-titik tertentu.

b. Komoditas dengan Harga Relatif Stabil

◦ Daging Sapi

Harga stabil di Rp125.000/kg sepanjang Oktober-Desember 2025, menunjukkan keseimbangan pasokan dan permintaan.

◦ Minyak Goreng (Kemasan)

Harga tetap di Rp17.000/liter selama Triwulan IV, didukung oleh ketersediaan stok dan kebijakan stabilisasi.

◦ Gula Pasir Lokal

Harga bertahan di Rp17.000/kg tanpa perubahan signifikan, mencerminkan distribusi yang lancar.

c. Komoditas dengan Penurunan Harga

◦ Cabe Merah

Harga menurun dari Rp60.000/kg (Oktober M2) menjadi Rp32.000/kg (Desember M4). Penurunan dipengaruhi oleh membaiknya pasokan dan masuknya masa panen.

◦ Beras Premium

Harga turun dari Rp16.000/kg (Oktober) menjadi Rp14.500/kg (Desember),

mencerminkan peningkatan pasokan dan stabilisasi pasar.

- **Jeruk**

Harga menurun dari Rp24.000/kg (Oktober M4) menjadi Rp21.000/kg (Desember M4). Penurunan dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan musiman.

d. Tren Bulanan

Pada bulan Oktober 2025, harga sebagian besar komoditas pangan di Kota Banjar relatif stabil, meskipun mulai terlihat tekanan kenaikan pada beberapa komoditas hortikultura seperti cabe rawit merah dan bawang merah. Komoditas pokok seperti beras dan minyak goreng masih berada pada level yang terkendali, mencerminkan kondisi pasokan yang relatif mencukupi pada awal triwulan.

Memasuki bulan November 2025, dinamika harga mulai meningkat. Kenaikan terjadi pada bawang merah dan cabe rawit merah seiring dengan mulai berkurangnya pasokan, sementara beberapa komoditas seperti cabe merah dan beras premium mengalami koreksi harga akibat masuknya pasokan dari daerah sentra produksi. Kondisi ini menunjukkan adanya proses penyesuaian antara pasokan dan permintaan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun.

Pada bulan Desember 2025, tekanan harga semakin terlihat pada sejumlah komoditas, khususnya cabe rawit merah dan bawang putih, seiring meningkatnya permintaan masyarakat pada momentum akhir tahun. Di sisi lain, harga cabe merah dan jeruk cenderung menurun akibat melimpahnya pasokan musiman. Secara umum, perkembangan harga pada Triwulan IV 2025 mencerminkan adanya pergeseran tekanan dari komoditas hortikultura tertentu ke komoditas lainnya, dengan stabilitas relatif tetap terjaga pada komoditas pangan pokok.

e. Komoditas Pangan dengan Risiko Tinggi ke depan

- **Cabe Rawit Merah**

Cabe rawit merah menjadi komoditas dengan risiko tertinggi ke depan seiring kenaikan harga dari Rp46.000/kg pada Oktober menjadi Rp58.000/kg pada Desember 2025. Tingginya volatilitas harga mencerminkan ketergantungan yang besar terhadap kondisi cuaca, gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT), serta keterbatasan pasokan lokal. Apabila terjadi gangguan produksi atau distribusi, harga berpotensi kembali meningkat dan menjadi sumber utama tekanan harga pangan pada periode berikutnya.

- **Bawang Merah**

Harga bawang merah meningkat dari Rp35.000/kg pada Oktober menjadi Rp42.000/kg pada Desember 2025. Kenaikan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan menjelang akhir tahun serta meningkatnya permintaan masyarakat. Produksi yang bersifat musiman dan keterbatasan daya simpan menjadikan komoditas ini rentan terhadap gejolak harga. Ke depan, tanpa penguatan *buffer stock* dan koordinasi pasokan antar daerah, bawang merah berpotensi kembali mengalami kenaikan harga.

- **Bawang Putih**

Bawang putih mengalami kenaikan harga dari Rp35.000/kg pada Oktober menjadi Rp40.000/kg pada Desember 2025. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dan impor menjadikan harga sangat sensitif terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi biaya logistik. Pada periode mendatang, potensi keterlambatan pasokan atau kenaikan biaya transportasi dapat mendorong harga kembali meningkat.

- **Cabe Merah**

Meskipun harga cabe merah menurun dari Rp60.000/kg pada Oktober menjadi

Rp32.000/kg pada Desember 2025, komoditas ini tetap memiliki risiko tinggi. Penurunan harga lebih dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan musiman, yang bersifat sementara. Memasuki periode berikutnya (tahun baru), apabila pasokan kembali menurun akibat faktor cuaca atau OPT, harga cabe merah berpotensi mengalami *rebound* secara cepat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Perkembangan harga komoditas pangan di Kota Banjar pada Triwulan IV 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama pengendalian harga masih didominasi oleh tingginya volatilitas pada komoditas hortikultura, khususnya cabai. Perubahan harga cabai yang berlangsung cepat antar titik pantau mencerminkan **belum stabilnya pasokan serta lemahnya daya tahan sistem distribusi terhadap gangguan produksi**. Kondisi ini berdampak langsung pada keterjangkauan harga ditingkat konsumen, terutama pada periode meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Selain itu, kenaikan bersih harga bawang merah dan bawang putih dibandingkan awal triwulan menunjukkan **masih terbatasnya kapasitas daerah dalam menjaga kesinambungan pasokan komoditas strategis**. Produksi yang bersifat musiman, keterbatasan daya simpan, serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menyebabkan harga kedua komoditas tersebut mudah tertekan ketika terjadi gangguan distribusi atau penurunan suplai. Kondisi ini memperkuat posisi Kota Banjar sebagai daerah yang relatif bergantung pada dinamika harga wilayah pemasok.

Faktor cuaca dan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) juga tetap menjadi permasalahan struktural yang memengaruhi stabilitas pasokan, khususnya pada komoditas hortikultura. Curah hujan yang tidak menentu dan serangan OPT di wilayah sentra produksi berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen, sehingga pasokan yang masuk ke pasar menjadi terbatas. Dampak gangguan tersebut semakin terasa pada periode meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru, yang belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh ketersediaan pasokan.

Di sisi lain, dinamika harga pada komoditas protein hewani seperti daging ayam ras dan telur ayam ras menunjukkan adanya **tekanan dari sisi biaya produksi dan permintaan**. Kenaikan harga pakan ternak, keterbatasan suplai pasca periode *oversupply* sebelumnya, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun turut mendorong kenaikan harga. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga komoditas peternakan masih sangat dipengaruhi oleh struktur biaya dan koordinasi pasokan lintas daerah.

Permasalahan pengendalian harga juga **diperkuat oleh keterbatasan kualitas dan kelengkapan data rantai pasok hulu-hilir pada Triwulan IV**. Ketersediaan data yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan evaluasi lebih banyak bertumpu pada pembacaan pola perubahan harga, belum pada analisis menyeluruh terhadap sumber gangguan pasokan. Selain itu, konsistensi input dan validasi data harga harian masih perlu diperkuat agar pengambilan keputusan dan komunikasi publik dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, **sinkronisasi agenda lintas instansi dalam pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga masih belum optimal**. Program seperti pasar murah, operasi pasar, dan bantuan pangan belum sepenuhnya diarahkan berdasarkan peta risiko komoditas dan

momentum kenaikan harga. Akibatnya, efektivitas intervensi masih bersifat situasional dan belum mampu membentuk stabilitas harga yang berkelanjutan.

Dengan demikian, permasalahan pengendalian harga di Kota Banjar pada Triwulan IV 2025 bersumber dari kombinasi volatilitas hortikultura, keterbatasan pasokan bawang, gangguan produksi akibat cuaca dan OPT, tekanan biaya produksi ternak, keterbatasan kualitas data, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pemantauan terpadu, manajemen pasokan berbasis risiko, serta perencanaan intervensi yang lebih terarah agar stabilitas harga dapat terjaga secara berkelanjutan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Kota Banjar melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan berbagai kebijakan dan kegiatan strategis yang mencakup aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif, antara lain ;

a. Keterjangkauan Harga

- Sebagai bentuk intervensi langsung kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Selasa Pasar Hasil Tani pada tanggal 09 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan mendekatkan pasokan kepada konsumen, memperpendek rantai distribusi, serta menyediakan alternatif pilihan belanja dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam desain operasional, GPM dan Selasa Pasar Hasil Tani dapat diarahkan pada komoditas yang sedang mengalami tekanan (misalnya cabai dan bawang), sehingga dampaknya lebih terasa pada stabilitas harga dan persepsi keterjangkauan.
- Selain itu, Operasi Pasar Murah (OPM) dilaksanakan pada 16 dan 24 Desember 2025. Kegiatan ini berfungsi sebagai penyangga (buffer) ketika terjadi kenaikan harga di pasar ritel, terutama untuk komoditas yang mudah terdampak oleh perubahan pasokan jangka pendek serta untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Bantuan pangan berupa beras dan MinyakKita pada 25-26 November 2025 di Desa Waringinsari, Kelurahan Langensari, dan Kecamatan Banjar. Penyaluran bantuan pangan merupakan instrumen perlindungan sosial yang relevan untuk menjaga daya beli kelompok rentan dan mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga pada komoditas pokok. Dari sisi stabilitas harga, bantuan pangan membantu menahan lonjakan permintaan pada segmen tertentu dan memperkuat ketahanan konsumsi masyarakat pada periode fluktuatif.

b. Ketersediaan Pasokan

- Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan dan sumber daya lokal. Program ini bersifat penguatan pasokan berbasis komunitas dan berdampak bertahap, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada pasokan pasar untuk komoditas tertentu. Dalam konteks pengendalian inflasi, PAKAYA berperan sebagai strategi mitigasi jangka menengah yang memperluas sumber pasokan dan meningkatkan resiliensi masyarakat.
- Selain itu, dilakukan Penanaman Jagung Serentak di Desa Cibeureum bersama Forkopimda Kota Banjar pada 09, 11 dan 23 Oktober 2025. Kegiatan ini menunjukkan penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan serta dukungan terhadap peningkatan

produksi pangan. Selain sebagai kegiatan produksi, penanaman serentak memiliki nilai koordinatif: memperkuat perhatian bersama terhadap agenda ketahanan pangan dan stabilitas harga.

- Gerakan Pengendalian OPT Wereng di Kota Banjar dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025. Kegiatan pengendalian OPT berorientasi pada pencegahan penurunan produktivitas tanaman yang dapat berimplikasi pada pasokan dan kestabilan harga komoditas pertanian. Dalam kerangka kerja TPID, pengendalian OPT menjadi bagian dari penguatan pasokan dan manajemen risiko produksi.
- Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dilaksanakan pada 15 November 2025. Kegiatan ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan tidak hanya bergantung pada intervensi pasar, tetapi juga pada upaya adaptasi dan mitigasi risiko yang memengaruhi produksi dan distribusi. Langkah-langkah adaptasi, termasuk penguatan praktik budidaya dan tata kelola risiko, berperan untuk menjaga kesinambungan pasokan.
- Pendistribusian Bantuan Benih Padi dilaksanakan pada 03 Desember 2025 di Langensari. Bantuan benih merupakan instrumen dukungan produksi yang berpotensi memperbaiki kapasitas tanam pada musim berikutnya, dengan implikasi jangka menengah terhadap ketersediaan pasokan.

c. Kelancaran Distribusi

- Pada Tw IV 2025, perbaikan infrastruktur jalan di Jalan Lili Kusuma dan Jalan Rejasari **telah tercovered** sepanjang 40,059 km sebagai upaya memperlancar distribusi barang dan pangan.
- Pengawasan peredaran barang dan jasa di Kota Banjar.

d. Komunikasi Efektif

- Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjar pada 06 Oktober, 14 November, dan 15 Desember 2025. HLM berfungsi sebagai forum perumusan langkah pengendalian inflasi, penyelarasan tugas lintas perangkat daerah, serta penetapan fokus komoditas dan intervensi. Pelaksanaan HLM secara periodik memberi ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan berbasis perkembangan terbaru di lapangan, serta memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan dalam kerangka kebijakan yang konsisten. Selain HLM, Pemerintah Kota Banjar mengikuti rapat koordinasi dwi mingguan pengendalian inflasi daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Partisipasi rutin pada forum koordinasi memperkuat arus informasi dan memperluas ruang konsolidasi kebijakan, terutama ketika dibutuhkan langkah respons cepat dan lintas wilayah.
- Untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan tidak terjadi penimbunan, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan Sidak Pasar pada 03 dan 30 Oktober, 05 dan 28 November serta 19 Desember 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau ketersediaan stok, memeriksa perkembangan harga ritel, serta mengidentifikasi indikasi masalah di lapangan (misalnya ketersediaan komoditas tertentu atau perbedaan harga antar pedagang). Sidak pasar juga berperan sebagai instrumen komunikasi langsung dengan pelaku usaha untuk mendorong praktik perdagangan yang wajar dan transparan.
- **Penerbitan Surat Edaran Wali Kota Banjar tentang himbauan belanja bijak menjelang nataru**; sesuai arahan Wali Kota dalam HLM TPID 15 Desember 2025
- **Penerbitan Surat Edaran Wali Kota Banjar tentang Upaya menjaga Inflasi menjelang Nataru**; sesuai arahan Wali Kota dalam HLM TPID 15 Desember 2025
- Selama Triwulan IV 2025, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan pelaporan harga

pangan secara harian melalui Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SiLinda) Jawa Barat, Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Simawas Pagi), serta Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Kegiatan pelaporan harian berfungsi sebagai dasar pemantauan berkelanjutan, penguatan koordinasi, serta penyusunan respons kebijakan ketika terjadi perubahan harga yang cepat.

- Pemerintah Kota Banjar juga melakukan ekspos harga pangan harian melalui Website Kota Banjar, media sosial Dinas KUKMP dan papan informasi harga di Alun-Alun Kota Banjar. Strategi komunikasi ini meningkatkan transparansi informasi harga serta membantu masyarakat mengakses referensi harga aktual. Dalam praktik pengendalian inflasi, konsistensi informasi publik menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dan mengurangi kesenjangan informasi antara konsumen dan pedagang.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 telah menunjukkan hasil positif, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain ;

a. Keterjangkauan Harga (K1)

- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Selasa Pasar Hasil Tani berfungsi efektif dalam memperpendek rantai distribusi dan menciptakan price reference alternatif bagi konsumen. Fokus pada komoditas bergejolak seperti cabai dan bawang mencerminkan pendekatan berbasis komoditas penyumbang inflasi. Namun, efektivitasnya masih bersifat temporer, sehingga dampak terhadap stabilitas harga agregat sangat bergantung pada frekuensi dan cakupan wilayah pelaksanaan.
- Operasi Pasar Murah (OPM) berperan sebagai buffer policy yang krusial ketika terjadi lonjakan harga di pasar. Dari perspektif stabilisasi harga, OPM efektif menjaga daya beli, tetapi memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat apabila tidak diiringi dengan mekanisme targeting yang presisi.
- Sementara itu, bantuan pangan (Beras SPHP dan MinyaKita) terbukti relevan sebagai instrumen perlindungan sosial. Kebijakan ini tidak hanya menahan tekanan inflasi dari sisi permintaan pada kelompok rentan, tetapi juga memperkuat ketahanan konsumsi rumah tangga. Tantangannya terletak pada keberlanjutan program dan potensi moral hazard jika tidak disinergikan dengan kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat.

b. Ketersediaan Pasokan (K2)

- Program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) menunjukkan orientasi penguatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga dan komunitas. Kontribusinya terhadap inflasi bersifat tidak langsung dan bertahap, namun signifikan dalam meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap guncangan pasokan. Kelemahannya terletak pada variasi kapasitas rumah tangga dan keterbatasan monitoring output produksi.
- Penanaman Jagung Serentak dan bantuan benih padi merupakan bentuk intervensi hulu yang memperkuat kapasitas produksi pangan. Dari sudut pandang pengendalian inflasi, kebijakan ini berfungsi sebagai penguatan di sisi penawaran yang penting, meskipun dampaknya baru terasa pada musim tanam berikutnya.
- Gerakan Pengendalian OPT Wereng dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) memperlihatkan pendekatan manajemen risiko produksi yang adaptif. Kebijakan ini relevan dalam konteks meningkatnya ketidakpastian iklim, yang merupakan faktor

struktural inflasi pangan. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi pendampingan teknis kepada petani.

c. Kelancaran Distribusi (K3)

- Pelaksanaan sidak pasar secara berkala berfungsi sebagai instrumen pengawasan sekaligus komunikasi langsung dengan pedagang. Kebijakan ini efektif dalam mencegah penimbunan dan mengurangi ketidaksesuaian informasi antara pemerintah dan pelaku pasar. Namun, sifatnya masih reaktif dan sangat bergantung pada intensitas pengawasan.
- Pengawasan peredaran barang dan jasa memperkuat aspek tata niaga dan kepatuhan pasar. Tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya pengawasan dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemetaan rantai distribusi.

d. Komunikasi Efektif (K4)

- Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) secara periodik dan partisipasi aktif dalam forum koordinasi provinsi ataupun pusat dapat memperkuat konsistensi kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah. Mekanisme ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan kondisi terkini.
- Pelaporan harga harian melalui SiLinda, Simawas Pagi, dan SP2KP menunjukkan praktik evidence-based policy yang baik. Data real-time menjadi fondasi penting bagi respons kebijakan yang cepat dan terukur.
- Ekspos harga melalui website, media sosial, dan papan informasi publik meningkatkan transparansi dan membantu membentuk ekspektasi harga masyarakat. Dalam perspektif ekonomi perilaku, keterbukaan informasi ini berkontribusi pada stabilitas pasar dengan mengurangi kepanikan dan spekulasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga, evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kota Banjar pada Triwulan IV Tahun 2025, Tim Pengendali Inflasi Daerah merekomendasikan beberapa langkah kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi inflasi menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan. Dalam hal ini, pengembangan sistem pemantauan terintegrasi yang menghubungkan data harga, pasokan, distribusi, dan permintaan pangan sangat diperlukan untuk memprediksi perubahan harga secara lebih akurat.
2. Penguatan ketahanan pangan berbasis lokal sangat relevan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal dan menjaga ketersediaan pasokan yang stabil. Program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) yang memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan dan sumber daya lokal perlu didorong lebih luas dengan pendampingan teknis kepada masyarakat, agar dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pasar. Program pertanian terpadu, seperti penanaman jagung serentak, juga menjadi langkah konkret untuk memperkuat kapasitas produksi pangan di tingkat lokal.

Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) sudah terbukti efektif

3.

dalam mengatasi lonjakan harga jangka pendek. Namun, kebijakan ini perlu diperluas dengan melibatkan pasar digital dan e-commerce pangan, untuk memberikan akses lebih luas kepada masyarakat terhadap produk pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Sistem distribusi pangan juga harus diperbaiki dengan mengintegrasikan saluran logistik modern, yang dapat mengurangi biaya distribusi dan memastikan harga yang stabil di pasar.

4. Pengawasan distribusi seperti pelaksanaan sidak pasar secara berkala sudah menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pasar dan mencegah penimbunan. Namun, untuk lebih efektif lagi, perlu adanya penguatan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan distribusi, serta integrasi data distribusi antarwilayah agar pengendalian harga bisa lebih responsif terhadap dinamika pasar.
5. Komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam menjaga transparansi dan memperkuat koordinasi antar sektor. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) secara rutin dan partisipasi aktif dalam forum koordinasi antar daerah adalah hal yang sangat baik. Untuk mendukung komunikasi yang lebih terbuka, pelaporan harga harian melalui platform seperti SiLinda dan Simawas Pagi, serta penggunaan media sosial dan website Pemerintah Kota Banjar, sangat efektif dalam menginformasikan harga pangan kepada masyarakat. Dengan informasi yang transparan, masyarakat akan lebih mudah memahami dinamika harga dan tidak mudah terjebak dalam spekulasi pasar.
6. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan juga sangat penting. Kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam menjaga kestabilan harga pangan dan mendukung ketahanan pangan lokal dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas cakupan kebijakan. Penyediaan fasilitas pembiayaan mikro untuk sektor pertanian dan perikanan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, agar usaha kecil dapat mengakses modal dengan lebih mudah.
7. Mengingat dampak besar perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, penting untuk memperkuat kebijakan yang membantu petani beradaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrem. Program seperti penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan pengelolaan risiko cuaca buruk sangat penting untuk meningkatkan hasil pangan secara berkelanjutan. Keberlanjutan ini dapat didukung dengan mendorong pertanian yang lebih alami (organik) dan penghematan air dalam kegiatan pertanian.